

Sembilan Tahun Torehan Dedikasi



9 Tahun
PPK
Membangun
Desa

Isi:

Redaksi	1
Laporan Utama	2
Cerita Lapangan	3
PPK 60 Hari	2-3
Cerita Sampul	4
Partisipasi	5
Pelatihan	5
Sosial	6
Cerbung FD	6

Tanpa terasa, kita sudah memasuki pertengahan 2007. Itu artinya, waktu yang kita miliki semakin berkurang, sementara pekerjaan nampaknya terus akan bertambah. Terlebih setelah diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) oleh Presiden pada akhir April 2007. Untuk itu, teman-teman di lokasi kerja, perlu membuat sebuah rencana kerja (RKTL) yang matang, agar dapat mencapai target dengan baik. Namun, bukan hanya target pencapaian dan penyelesaian pekerjaan yang perlu diperjuangkan, melainkan juga target "pemberdayaan masyarakat"-nya.

Disadari atau tidak, selama ini kita lebih terpaku pada upaya pencapaian target pencapaian dan penyelesaian pekerjaan. Sedikit sekali yang berorientasi pada target pencapaian perubahan pola pikir dan tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai konsultan/ fasilitator/ pelaku pemberdayaan masyarakat, seharusnya kita juga membuat rencana kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa. Dengan begitu, tidak hanya mendapat jalan, jembatan, irigasi atau pinjaman bergulir dari PPK, melainkan masyarakat juga bisa lebih pandai, bijaksana dan kreatif.

Di tahun ke-9 pelaksanaan program, nampaknya tak berlebihan bila kita mulai memikirkan hal itu. Tak ada kata terlambat untuk pemberdayaan masyarakat, asalkan kita mau melakukannya kebersihan hati. Dengan begitu, tak berlebihan pula bila kita berharap Tahun ke-9 ini menjadi tonggak kebangkitan pemberdayaan masyarakat.

Salam SIKOMPAK!

Laporan Utama

PNPM Dimata Presiden



Setelah diperkenalkan untuk pertama kali pada September 2006, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akhirnya diresmikan oleh Presiden RI, Senin (30/4) lalu, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namanya PNPM Mandiri.

Dengan diresmikannya PNPM Mandiri, berarti pelaku PPK harus lebih meningkatkan kualitas kerja. Pasalnya, PPK yang merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini merupakan motor utama PNPM Mandiri. Hal ini terlihat dari jumlah lokasi yang dipercayakan PNPM untuk digarap dengan skema PPK tahun ini, yakni mencapai 1.993 kecamatan. Jumlah tersebut diluar lokasi program lain yang dicangkokkan ke PPK, seperti SADI, Green KDP, dan lanjutan pilot pendidikan. Presiden sendiri menilai program pengentasan kemiskinan tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, pemerintah akan berupaya serius melakukannya.

"Tahun depan, akan kita tingkatkan lagi, agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih berarti, sehingga upaya pengentasan kemiskinan bisa berlangsung lebih cepat lagi. Inilah yang kita lakukan melalui PNPM Mandiri," Presiden menjelaskan. Dalam acara peresmian itu Presiden juga berdialog dengan pemanfaat kegiatan PPK dari desa Kumbasa, Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dilanjutkan dengan mengunjungi stand PPK bernuansa "desa" yang dikerjakan oleh para konsultan dan fasilitator se-Sulawesi Tengah.

PPK 60 Hari

- Terhitung dari 10-15 April 2007, dilaksanakan **Training of Trainers (TOT)** untuk menyiapkan pelatih/ fasilitator yang akan ditugaskan pada pelatihan penyegaran dan pelatihan praturgas. Adapun peserta TOT terdiri dari Konsultan dan Fasilitator yang terpilih dari masing-masing region. Kegiatan ini diadakan di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Makassar dan Denpasar.
- **Cianjur** - Deputi Bidang Koordinator Penanggulangan Kemiskinan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi PPK di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu (2/1/4). Kunjungan tersebut untuk melihat lebih dekat pelaksanaan PPK, hasil kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat miskin dan kaum perempuan. Sujana Royat puas dengan hasil yang dicapai PPK.

SBY Takjub PLTMH PPK

Saat berkunjung ke Stand PPK di lokasi peresmian PNPM Mandiri, Presiden sempat melihat maket Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). "Bagus sekali..." ungkap Presiden takjub. Presiden didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Itu adalah PLTMH yang didanai PPK di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Pembangkit listrik itu memiliki kapasitas 10.000 watt dan sudah dimanfaatkan oleh 300 kepala keluarga (KK). "Jadi, sekarang mereka sudah bisa melihat TV, ya..." tanya Ibu Ani dengan mata berbinar pertanda takjub.

Apalagi setelah Presiden diberikan informasi bahwa PLTMH ini dibangun oleh warga desa dengan harga murah, hanya Rp 143,7 juta. Sebagian dananya pun kembali ke masyarakat sebagai upah untuk 99 warga yang turut bekerja dan membukukan 298 Hari Orang Kerja (HOK).

"Jadi, pembangkit listrik ini dikerjakan oleh warga desa..." tanya Ibu Ani lagi. "Bagus sekali. Selamat ya. Lanjutkan perjuangan..." imbuh Presiden, sebelum meninggalkan Stand PPK. Tentu saja, ini adalah pujian sekaligus tantangan. Kita harus berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik.



Presiden Terima "Buku Surat dari Desa"

Ada banyak hal yang menjadi pusat perhatian Presiden di Stand PPK. Salah satunya adalah buku "Surat dari Desa". Buku tersebut merupakan kumpulan kisah, pandangan/ penilaian dan pengalaman masyarakat serta pelaku PPK di tanah air. "Ini merupakan tulisan langsung warga desa dan pelaku PPK di lapangan, lalu kami kumpulkan dan sunting," ujar Team Leader KM-Nasional PPK, Ibnu Taufan, kepada Presiden.

"Surat dari Desa" menunjukkan bahwa masyarakat desa pun dapat menjadi penggerak pembangunan yang baik. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka, telah menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi diri dan desanya. Mendengar hal itu, Presiden langsung meminta buku tersebut dan menerimanya. "Ini bagus sekali. Lanjutkan tugas Mulia ini," ungkap Presiden.

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ayip Muflich, sendiri mengatakan, "Buku ini mengukir kenyataan bahwa masyarakat desa telah belajar mengemban kepercayaan dengan kerja keras untuk mewujudkan impian dalam kebutuhan yang paling prioritas masyarakat," ungkapnya seperti dalam pengantar buku itu. Maka dari itu, masyarakat dan konsultan PPK harus lebih rajin mengirim tulisan ke KM-Nasional untuk bahan pembuatan buku lainnya!

Cerita Lapangan

Kunjungan Anggota DPR-RI

Pertengahan Mei 2007, anggota Komisi II DPR-RI, Andi Yuliani Paris, berkunjung ke salah satu lokasi PPK di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Polewali. Beliau terkesan dengan hasil kegiatan PPK, terutama perubahan yang terjadi di masyarakat. "Kita bisa lihat, PPK itu bukan hanya membangun sarana prasarana, tetapi juga manusianya," ungkap Yuliani Paris.

Dalam kunjungannya di lapangan, Yuliani sempat berdialog dengan pelaku PPK, seperti staf UPK, FK, TPK, Tim Pemelihara, dan penerima manfaat PPK, seperti anggota kelompok SPP dan masyarakat lain. Yuliani yang didampingi TK-PPK Provinsi Sulbar dan Kabupaten Polewali serta konsultan, sempat berdiskusi dengan Camat Wonomulyo, Polewali Mandar. "Hasil kegiatan disini bagus, tapi saya ingin tahu, apakah di daerah lain juga sebegini," ungkapnya dengan nada bertanya. Pertanyaan Yuliani itu merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para pelaku PPK di lapangan. Hanya kerja keras dan disiplinlah yang bisa menunjukkan kinerja yang baik.

Selain berkunjung ke Kantor UPK Wonomulyo, Yuliani Paris menyempatkan untuk bertemu para anggota kelompok SPP di salah satu rumah warga di Kelurahan Sumberjo, Wonomulyo. Perjalanannya kemudian dilanjutkan dengan melihat jembatan gantung di Kelurahan Darma, masih di Wonomulyo, kemudian melihat Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Handayani di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang.



Sriyati Dipuji Yuliani

Siapa pun akan merasa grogi dan deg-degan saat menjalankan sesuatu untuk pertama kali. Begitu pula Sriyati, FK Wonomulyo, Polewali, Sulbar. Dia deg-degan saat berhadapan dengan anggota Komisi II DPR RI, Andi Yuliana Paris. "Saya sempat panas dingin juga awalnya..." ungkap Sriyati jujur.

Ceritanya begini. Saat berkunjung ke UPK Wonomulyo, medio Mei silam, Yuliani melontarkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya diajukan untuk FK. Bagaimana cara FK memfasilitasi masyarakat agar tidak terjebak antara keinginan dan kebutuhan. Sriyati pun menjawab dengan tegas, pertama-tama kita ajak masyarakat untuk memahami apa arti kebutuhan dan apa arti keinginan itu. "Caranya..." tanya Yuliani.

Salah satu caranya, jawab Sriyati, dengan melemparkan ke pertanyaan ke masyarakat, apakah bila usulan tersebut tidak se dipenuhi akan ada dampak buruk bagi masyarakat dan desa? jawabannya tidak, maka usulan itu bisa diajukan di waktu mendatang. Lalu, Sriyati pun menjelaskan kriteria penentuan usulan prioritas dalam MAD Prioritas Usulan, yang ternyata cocok dengan apa yang ingin Yuliani Paris dengar. Sang anggota dewan pun tersenyum bangga. "Wah... pintar sekali kamu..."

Lalu, Yuliani nampaknya ingin mengetahui, apakah para konsultan lain di lokasi lain juga hafal akan kriteria penentuan prioritas usulan tersebut dan menerapkannya dengan baik? Oleh sebab itu, keseriusan fasilitator dan konsultan di lapangan dalam mendampingi masyarakat perlu ditingkatkan. Setuju...?



Kirimkan informasi mengenai kegiatan masyarakat dan pelaku PPK di lokasi Anda ke Redaksi Buletin PPK. Informasi yang layak, akan dimuat dalam Buletin PPK edisi selanjutnya. Terima kasih - Redaksi PPK

Cerita Sampul



9 Tahun PPK:

Bangkitnya Pemberdayaan Masyarakat!

Tanpa terasa, PPK sudah sembilan tahun membangun bersama masyarakat. Inilah saat yang tepat untuk lebih menetapkan nama PPK di masyarakat. Caranya? Bisa dengan mengadakan berbagai kegiatan yang murah meriah.

Menurut para "sesepuh", pelaksanaan PPK di lapangan dimulai pada September 1998. Itu artinya, sebentar lagi, pelaksanaan PPK akan memasuki tahun kesembilan. Kata orang, angka sembilan itu adalah angka "keramat", sakti, dan bisa membawa berkah. Jadi, tidak ada salahnya kita memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kembali semangat kita sebagai pendamping masyarakat? Teman-teman di lapangan dapat membuat acara tematik yang murah meriah. Maksudnya, biayanya terjangkau (apalagi kalau ada sponsor), tapi melibatkan banyak orang.

Kegiatan yang dapat dilakukan di lapangan diantaranya kampanye lewat spanduk atau umbul-umbul bertuliskan PPK sebanyak-banyaknya, serta menggelar acara-acara yang menarik, seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang, balap karung, dan tarik tambang, dengan hadiah yang menarik. Atau, bisa juga diisi dengan pertunjukan seni dan hiburan.

Tidak hanya di tingkat kabupaten atau provinsi, pelaku PPK dapat menggelar lomba karaoke atau

gerak jalan dalam rangka "Sembilan Tahun PPK: Bangkitnya Pemberdayaan Masyarakat...!". Atau, bisa juga dengan menggelar diskusi/ sarasehan/ lokakarya dengan tema seputar pemberdayaan masyarakat. Acara-acara tersebut dapat digabung dengan pemutaran film "Bangkit Menuju Esok yang Lebih Cerah" ataupun bazaar hasil-hasil kerajinan para penerima manfaat SPP/ UEP. Atau mungkin ada yang lebih tertarik untuk membuat acara wayang orang semalam suntuk atau dzikir bersama...? Istighatsah...?

Bagi yang memiliki dana lebih, apalagi yang telah memiliki jaringan dengan radio atau radio komunitas (Rakom), bisa menggelar talkshow dengan topik yang mengarah pada peringatan ini. Dengan pendekatan yang baik, dukungan untuk menggelar peringatan "Sembilan Tahun PPK: Bangkitnya Pemberdayaan Masyarakat..." nampaknya akan mengalir dari berbagai pihak: bisa dari TK-PPK atau pihak sponsor. Baik dukungan moril maupun materiil (dana). Bila akan memberikan hadiah kepada peserta (anggota masyarakat) yang turut dalam kegiatan ini, akan lebih berkesan bila salah satu hadiahnya adalah trofi bertuliskan PPK dan pihak sponsor. Bagaimana, apakah siap bangkit sekarang...??? Hanya kita yang bisa membangkitkan semangat diri dan masyarakat. Apalagi sekarang kita mulai memasuki era Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Ayo kita sukseskan 9 Tahun PPK!

Partisipasi

Warga Lerematang Pilih PPK

Warga Desa Lerematang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, lebih memilih PPK untuk membiayai rehab Sekolah Dasar di wilayahnya. Padahal, dengar-dengar, Pemda sudah siap mengucurkan dana untuk kepentingan itu. Kenapa warga Lerematang lebih memilih PPK, ya...?

Ada banyak alasan. Salah satunya adalah karena dana PPK bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Sehingga penggunaannya dapat dikontrol langsung oleh masyarakat. Selain itu, dengan dikelola sendiri oleh warga, maka secara otomatis, pelaksanaannya pun akan dilakukan warga. Sehingga akan banyak warga yang menjadi tenaga kerja dan mendapat upah. Sedangkan dana dari Pemda, ungkap seorang warga, biasanya dikelola oleh pihak ketiga (kontraktor).

Dari PPK, warga Lerematang hanya mendapat alokasi dana PPK III/b Siklus IX sebanyak Rp1.748.261.000 ditambah kesanggupan warga untuk berswadaya sebesar Rp 15.468.200. Sedangkan dari Pemda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dananya lebih besar. "Walaupun dana dari PPK lebih kecil, kami lebih memilih PPK, karena dananya bisa kami kelola sendiri sesuai kebutuhan kami," ungkap salah seorang warga Desa Lerematang.

Hal itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap PPK. Hal itu juga menunjukkan telah terjadi perubahan pola berpikir masyarakat dalam pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, pengelolaan dan pengawasan pembangunan mandiri. Kini warga Lerematang tengah bekerja bahu-membahu mewujudkan cita-citanya memperbaiki SD disana.

Bukan hanya laki-laki, kaum perempuan pun turut berpartisipasi aktif. Mulai dari mengangkut bahan baku, seperti batu, pasir dan semen. Mereka melakukannya dengan penuh keceriaan. Bahkan ada yang bekerja sambil menggondong anak. Meski di desa itu lebih banyak kaum perempuan ketimbang laki-lakinya, namun kenyataan itu menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap PPK. Semoga SD yang dibangun segera dapat ditempati. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan di lokasi lain?

Laporan: Ade Sunarya, Korporat Maluku



Pelatihan

Disperindag Cirebon Dukung UPK



Sudah menjadi komitmen semua pihak bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK harus lestari, tidak hanya hidup saat adanya pendanaan program PPK. Untuk mencapai harapan tersebut, UPK perlu diperkenalkan ke pihak lain diluar PPK dan mengembangkan jaringan. Tujuannya agar semakin banyak pihak yang menjalin hubungan dan menjadi penyokong kelestarian UPK dengan berbagai kegiatan atau bentuk kerjasama.



Itulah yang diupayakan pelaku PPK di Cirebon, Jawa Barat. UPK mulai diperkenalkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Cirebon. Alhasil, 20 staf UPK dari

13 kecamatan mendapat pelatihan kepemimpinan dan motivasi kerja dari Disperindag. Nama pelatihannya adalah Achievement Motivation Training (AMT), dilaksanakan di Hotel Tryas, Kodya Cirebon. "Mudah-mudahan tahun depan kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini bagi staf UPK yang belum mengikuti," ujar staf dari Disperindag.

Tak cuma AMT, mereka juga diajak outbond yang ditangani oleh LOGISS Bandung di obyek wisata Cilimus. "AMT dan outbondnya seru! Semua materinya menarik dan menyenangkan," ungkap Kodir, dari UPK Sedong. Dari pelatihan ini, diharapkan staf UPK memiliki motivasi dan etos kerja yang lebih baik. Serta lebih terampil menyelenggarakan pelatihan, penguatan dan mampu memberi motivasi kepada kelompok binaannya. Semoga pelaku PPK lainnya pun mulai melebarkan jejaring.

Laporan: Havik Martaya, Pendamping UPK Jawa Barat

Sosial

Dari UPK Bongas:

150 Seragam untuk Pelajar

Belum lama ini, UPK dan pelaku PPK di Kecamatan Bongas, Indramayu, Jawa Barat, menyalurkan bantuan sosial berupa paket seragam sekolah bagi anak-anak SD dan Madrasah Ibtidaiyah, di aula kecamatan Bongas. Paket itu dibagikan ke 150 anak kurang mampu dari 27 SD dan dua Madrasah. Penerima bantuan tersebut ditentukan bersama dengan para guru sekolah yang bersangkutan, agar tepat sasaran. Paket itu berupa baju-celana, sepatu dan satu pak buku, yang totalnya senilai Rp 14 juta dari total alokasi Rp 21,9 juta. Sumber dana bantuan sosial ini berasal dari surplus UPK untuk tahun 2006. Menurut rencana, alokasi dana sosial yang tersisa akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial lain.

Selain untuk dana sosial, UPK Bongas juga telah mencadangkan dana untuk pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok, kegiatan pendanaan MAD, operasional Badan Pengawas UPK, reward bagi staf UPK dan pembangunan gedung UPK. "Kami ingin masyarakat melihat bahwa UPK tidak hanya berkaitan



Wajah ceria anak-anak penerima bantuan dana. Camat Bongas menyerahkan bantuan.

dengan pemberian pinjaman bergulir kepada segelintir orang, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkap Ketua UPK Bongas, Iftitahul Zannah. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi UPK lain untuk berkiprah lebih baik dalam pengentasan kemiskinan, sesuai harapan PPK dan kita semua.

Laporan: Havik Martaya, Pendamping UPK Jawa Barat

Cerbung FD

Manfaat Menjadi FD:

Puas Lahir Bathin...!

Pada umumnya, warga desa merasa mendapat banyak manfaat setelah menjadi Fasilitator PPK di desanya. Mulai dari manfaat yang sifatnya aktualisasi diri, sampai dengan yang membawa perubahan atau perkembangan. Baik pekerjaan, penghasilan, juga pengetahuan. Setelah menjalani tugas sebagai FD, banyak warga yang menyadari bahwa mereka juga bisa bermanfaat bagi warga desa atau desanya, dengan berpartisipasi langsung dalam pembangunan desanya.

Selain itu, manfaat yang banyak dirasakan oleh FD adalah merasa lebih dikenal, lebih diaggap dan pendapatnya didengar oleh warga desa. Seperti dituturkan FD di Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, "Setelah menjadi FD, ape yang saye omongkan didengar urang kampung," ungkapnya. Beberapa FD sering dijadikan tempat curhat warga dan tempat menyampaikan usulan-usulan menyangkut dusunnya. Baik yang menyangkut PPK atau di luar PPK dan mendiskusikan masalah-masalah mereka. Rumah FD pun dijadikan tempat berkumpul warga. FD juga mendapat banyak wawasan dan pengetahuan baru, khususnya mengenai cara bermusyawarah dengan menjunjung nilai demokrasi. Mereka menjadi tahu cara membuat proposal yang baik dan terbuka pikirannya mengenai cara merancang dan membangun prasarana sarana desa yang baik. Secara umum, para FD bertambah pengetahuannya mengenai bangunan.

Pergaulan para FD pun menjadi luas, bisa mendapat banyak teman atau relasi baru. Baik sesama pelaku PPK ataupun perangkat-perangkat desa. "Pengetahuan dan wawasan saya bertambah. Kenal dengan lurah-lurah desa lain, perangkat dukuh,

dan tokoh masyarakat. Ada yang nakal, baik, serta dengan karakter yang beraneka ragam," kata seorang fasilitator Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Jawa Tengah.

Dengan sering berkomunikasi dengan para pelaku PPK, banyak FD yang mendapat ruang diskusi baru untuk membicarakan segala hal mengenai desanya masing-masing, khususnya menyangkut pembangunan desa. Sebagian FD juga mendapat banyak tawaran atau dipercaya untuk menempati beberapa jabatan organisasi di desanya. Ada yang diminta menjadi Sekdes, ada juga yang diminta menjadi Khatib pada Sholat Jumat di Mesjid desanya, tidak lama setelah menjabat sebagai FD.

Manfaat lain yang dirasakan sejumlah FD adalah, dengan lebih dikenal masyarakat, maka usaha mereka menjadi lebih dikenal juga dan bertambah maju. "Menjadi FD membuat nama saya semakin dikenal masyarakat. Menjadi FD, membuat usaha rias pengantin saya di Desa Pucangsongo semakin laris. Bahkan semakin banyak kenalan dari desa lainnya, karena mereka juga ada yang memakai jasa dekorasi saya," kata seorang FD perempuan di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Selain itu, beberapa FD menceritakan bahwa sekalipun minim, namun honorinya sebagai FD cukup berarti untuk menambah penghasilan. Seorang FD perempuan di Desa Temuireng, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya mengatakan, "Gaji tiap bulan dari PPK itu saya gunakan untuk membiayai kuliah saya selama ini." Sungguh bermanfaat. Ada yang berminat menjadi FD...?



Redaksi Buletin PPK. Ikhwani Maulana, Achmad Rabin Taim
Unit Informasi Edukasi dan Komunikasi. Graha Pejaten No.2, Jl. Raya Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Tlp. 021 7988940/7988918, Fax. 021 7974712
Email. buletin@ppk.or.id, buletinppk@yahoo.com, Web. www.ppk.or.id

Keluhan atau pengaduan. P.O. BOX 612 JKP - SMS. 021 7041 7954